Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance pada Audit Delay

Ni Putu Shinta Oktaviani¹ Dodik Ariyanto²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: shintaoktaviani130@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, dan *corporate governance* pada *audit delay*. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2017. Jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan sehingga didapat 96 amatan dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan variabel *financial distress* dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Ukuran perusahaan, komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada *audit delay*.

Kata Kunci: Financial distress, ukuran perusahaan, corporate governance, audit delay

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial distress, company size, and corporate governance on audit delay. This research was conducted at mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The number of samples taken was 32 companies so that there were 96 observations, with a purposive sampling method. The analysis technique used in this study is multiple linear regression. Based on the results of the analysis found that financial distress and independent board of commissioners have positive effect on audit delay. Firm size, audit committee and institutional ownership have negative effect on audit delay.

Keywords: Financial distress, firm size, corporate governance, audit delay

PENDAHULUAN

Audit atas laporan keuangan diperlukan untuk meyakinkan investor serta pihak berkepentingan tentang kewajaran informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif seperti: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha,

pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran (OJK, 2016).

Fenomena mengenai keterlambatan publikasi laporan keuangan auditan diantaranya: tahun 2015 sebanyak 18 perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangan auditan 2015 dan/belum membayar denda (BEI, 2016), tahun 2016 sebanyak 17 perusahaan dikenakan suspensi saham oleh BEI karena terlambat melaporkan laporan keuangan auditan 2016 (Liputan6.com, 2017), tahun 2017 sebanyak 10 perusahaan suspensi saham oleh BEI karena terlambat melaporkan laporan keuangan auditan 2017 (Indopremier.com, 2018). Ditinjau dari hal tersebut, perusahaan pertambangan yang telat melaporkan hingga berujung suspensi saham diantaranya, yakni PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. (BORN), Berau Coal Energy Tbk. (BRAU), Energi Mega Persada Tbk. (ENRG), Benakat Integra Tbk. (BIPI), Bumi Resources Tbk. (BUMI), Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA), Garda Tujuh Buana Tbk. (GTBO), Ratu Prabu Energi Tbk. (ARTI), Bara Jaya Internasional Tbk. (ATPK), Cakra Mineral Tbk. (CKRA). Hal ini yang melatarbelakangi dipilihnya sektor pertambangan sebagai lokasi penelitian dikarenakan perusahaan sektor pertambangan sering mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan bahkan hingga berujung pada suspensi perdagangan saham oleh BEI. Penundaan penyampaian laporan keuangan tahunan dapat diakibatkan karena laporan keuangan tersebut masih dalam proses audit oleh auditor independen perseroan.

Audit delay atau audit report lag merupakan jangka waktu proses penyelesaian audit yang dihitung dari akhir tahun buku (31 Desember) sampai

tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Ashton et al., 1989).

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi audit delay dalam penelitian ini

diantaranya financial distress, ukuran perusahaan, dan corporate governance.

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan

perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan

perusahaan mengalami kebangkrutan (Praptika dan Rasmini 2016). Penelitian

Diratama (2018) menunjukkan prediksi kebangkrutan yang dialami sektor

pertambangan pada tahun 2014 sebesar 62,5%, tahun 2015 sebesar 60% dan tahun

2016 sebesar 57,5%. Penelitian ini menunjukkan selama tiga tahun berturut-turut

sektor pertambangan memiliki persentase prediksi kebangkrutan diatas 50%.

Penelitian Vuko dan Cular (2014) dan Sakka dan Jarboui (2016) menunjukan debt

to total asset yakni proksi dari financial distress positif terhadap audit delay.

Hasil penelitian oleh Praptika dan Rasmini (2016) dan Kusuma (2018)

menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif pada audit delay.

Penelitian Akhalumeh et al. (2017) mengungkapkan debt to total asset tidak

berpengaruh terhadap audit delay.

Perusahaan berskala besar maupun skala kecil memiliki kemampuan yang

berbeda pada pengelolaan operasionalnya antara lain dari segi pengendalian

internal, faktor eksternal maupun dari segi penerapan teknologinya. Penelitian

Suparsada dan Putri (2017) berfokus pada sektor manufaktur menunjukkan

pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Hasilnya sejalan

dengan penelitian Hassan (2016) dan Sakka dan Jarboui (2016). Penelitian

Widyastuti dan Astika (2017) pada sektor perbankan dan barang konsumsi

menunjukkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hasilnya sejalan dengan penelitian Arifuddin *et al.* (2017) sedangkan penelitian Lawrence *et al.* (2015) menunjukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah seperangkat aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal sehubungan dengan hak dan kewajiban atau sistem yang mengontrol dan mengarahkan perusahaan (Bemby *et al.*, 2013). *Corporate Government* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional diduga memiliki andil dalam terjadinya *audit delay*.

Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan terutama dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penelitian Afify (2009) dan Swami dan Latrini (2013) menunjukkan pengaruh negatif antara dewan komisaris independen terhadap *audit delay*. Penelitian Azubike dan M. Aggreh (2014) dan Harindahyani (2018) menunjukan pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap *audit delay* sedangkan penelitian Bemby *et al.*, (2013) dan Panggabean dan Yendrawati (2016), Sakka dan Jarboui (2016) menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder

lainya. Penelitian yang dilakukan oleh Bemby et al., (2013), Gunarsa dan Putri

(2017), Santiani (2018) menunjukkan komite audit memiliki pengaruh negatif

terhadap audit delay sedangkan menurut penelitian Pratama (2014) dan Ishaq dan

Che-ahmad (2016) komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan

investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Penelitian Sakka dan

Jarboui (2016), Suparsada dan Putri (2017), Arumsari (2017) menunjukan adanya

pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan audit delay sedangkan

penelitian Bemby et al. (2013) dan Panggabean dan Yendrawati (2016)

menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian dilandasi teori utama diantaranya teori agensi dan teori sinyal,

serta teori pendukung diantaranya teori stakeholder dan teori kepatuhan. Agency

problem timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri dan

munculnya konflik ketika beberapa kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas

bersama. Asimetri informasi juga dapat memicu konflik keagenan sehingga

diperlukan adanya pihak ketiga yakni auditor yang bertugas memastikan

kewajaran informasi yang disampaikan manajemen. Konflik keagenan mendasari

biaya keagenan. Biaya audit eksternal merupakan salah satu komponen biaya

agensi diantaranya monitoring cost.

Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal

kepada pengguna laporan keuangan dimana sinyal yang ditangkap berupa bad

news atau good news (Akerlof, 1970). Financial distress merupakan salah satu cerminan dari bad news yang dihadapi perusahaan. Proses pengauditan bila perusahaan mengalami rugi atau mengindikasikan adanya kondisi keuangan yang buruk (financial distress) maka hal itu merupakan sinyal tersendiri kepada auditor mengenai resiko audit yang tinggi.

Stakeholders Theory menyatakan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dipertanggungjawabkan tidak hanya untuk pemegang saham tapi juga stakeholder lain. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada stakeholders tersebut dapat berupa pelaporan keuangan yang dalam prakteknya memerlukan pihak ketiga (auditor independen) guna menjamin kewajaran laporan keuangan.

Teori kepatuhan (compliance theory) dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, dalam penelitian ini audit delay sangat berkaitan dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Financial distress merupakan salah satu cerminan dari bad news yang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya agar terlihat lebih baik dengan adanya perbaikan laporan keuangan tersebut maka penyampaian laporan keuangan yang diaudit akan lebih panjang (Kusuma, 2018). Proporsi relatif dari utang terhadap total aset dapat menjadi indikasi kesehatan keuangan dari perusahaan. Tingginya proporsi hutang terhadap

total aset akan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan sehingga

meningkatkan kekhawatiran tambahan auditor bahwa laporan keuangan mungkin

kurang dapat diandalkan dari biasanya seperti kemungkinan penipuan manajemen

dan karenanya auditor harus lebih teliti memeriksa laporan keuangannya sehingga

dapat menambah audit delay (Carslaw dan Kaplan, 1991). Semakin tinggi nilai

rasio financial distress maka audit delay semakin panjang. Kondisi financial

distress yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada

auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi dengan

meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (risk

assessment) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan

audit (audit planning) sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit

dan berdampak pada bertambahnya audit delay (Praptika dan Rasmini 2016).

Hasil penelitian oleh Praptika dan Rasmini (2016) dan Kusuma (2018)

menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif pada audit delay.

Jiming dan Weiwei (2011) menunjukkan debt asset ratio (DAR) berpengaruh

terhadap prediksi financial distress. Penelitian Vuko dan Cular (2014), Sakka dan

Jarboui (2016) menunjukan debt to total asset positif terhadap audit delay. Maka

hipotesisnya sebagai berikut.

H₁: Financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay

Teori agensi menunjukkan bahwa manajemen puncak di perusahaan besar

lebih sulit untuk mengawasi perusahaan karena perusahaan besar cenderung lebih

banyak agent dan monitoring cost daripada perusahaan kecil (Hassan, 2016). Oleh

karena itu, perusahaan besar mengadopsi sistem akuntansi dan audit internal yang

efektif dan diharapkan akan memungkinkan auditor eksternal untuk bergantung pada sistem tersebut secara lebih luas dan dengan demikian mengurangi pekerjaan audit yang diperlukan. Perusahaan besar lebih mungkin untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih cepat (Hassan, 2016). Perusahaan besar cenderung akan mempublikasikan lebih awal laporan keuangannya daripada perusahaan kecil karena perusahaan tersebut diawasi secara ketat oleh investor, kreditur, pengawas dan pemerintah sehingga perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit yang lebih awal (Sari, 2015). Penelitian Wulandari dan Wiratmaja (2017), Sari (2015), Melati dan Sulistyawati (2016), Apadore & Noor (2013), Hassan (2016), Sakka dan Jarboui (2016) menunjukkan pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit delay. Maka hipotesisnya sebagai berikut.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

Perusahaan yang memiliki komisaris independen, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih terintegrasi karena adanya pengawasan dan perlindungan hak kepada pihak diluar manajemen perusahaan (Swami dan Latrini, 2013). Namun, disatu sisi *The Agency Theory* menyatakan bahwa ada batas atas untuk jumlah kemandirian dewan, sejumlah besar independensi dewan dapat menciptakan masalah komunikasi dan koordinasi karenanya efektivitas sehingga pemantauan efisiensi menurun (Dimitropoulos and Asteriou, 2010 dalam Harindahyani, 2018). Penelitian Apadore *and* Noor (2013) menemukan bahwa dewan yang lebih independen cenderung menjadi dorongan untuk masalah

argumen atau permusuhan karena perbedaan pendapat dan saran dan ini akan

memperpanjang dengan ketepatan waktu laporan audit. Penelitian Joened and

Damayanthi (2016), Azubike and M. Aggreh (2014), dan Harindahyani (2018)

menunjukan pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap audit

delay. Maka hipotesisnya sebagai berikut.

H₃: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *audit delay*

Sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 bahwa setiap

perusahaan publik wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal tiga

orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan dua orang dari luar

perusahaan. Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu

bekerja lebih efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh

manajemen perusahaan (Choi et al., 2004). Penerapan komite audit yang baik

kepada perusahaan akan mampu menciptakan laporan keuangan yang andal.

Laporan keuangan perusahaan yang terpercaya pada akhirnya akan memfasilitasi

dan mempercepat audit yang dilakukan oleh auditor independen, hal ini karena

peluang auditor independen dalam menemukan salah saji material akan lebih kecil

sehingga audit laporan keuangan akan lebih singkat (Putra et al., 2017).

Perusahaan dengan jumlah komite audit yang lebih banyak akan

memberikan beberapa tekanan atau tuntutan pada manajemen dan karenanya

laporan audit yang lebih cepat (Apadore and Noor, 2013). Penelitian Mohamad

Nor et al. (2010) menyatakan bahwa semakin besar keanggotaan komite audit

maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan. Kontrol internal yang

lemah merupakan salah satu penyebab audit delay yang lama (Carslaw and

Kaplan, 1991). Penelitian yang dilakukan oleh Bemby *et al.*, (2013), Gunarsa dan Putri (2017), Putra *et al.* (2017), Santiani (2018) komite audit dikatakan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Maka hipotesisnya sebagai berikut.

H₄: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

Konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen dapat diminimalisir dengan kepemilikan institusional. Mengingat bobot yang cukup besar yang dimiliki investor institusi di dalam perusahaan, investor institusi bertanggung jawab untuk memainkan peran aktif dalam memantau dan mendisiplinkan wewenang manajer serta proses pelaporan keuangan (Sakka *and* Jarboui, 2016). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen (Arumsari, 2017).

Penelitian Sakka *and* Jarboui (2016) menunjukkan peningkatan kepemilikan investor institusional dapat meminimalkan *delay audit* dan mengurangi kemungkinan kecurangan manajemen. Sejalan dengan penelitian Suparsada dan Putri (2017) dan Arumsari (2017) yang menunjukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *audit delay*. Kepemilikan dari pihak institusi juga dapat mengurangi *audit delay* karena pihak institusi dapat menuntut pihak manajemen agar tepat waktu dalam menyelesaikan

laporan keuangan auditan. Para pemilik investasi akan mengindikasikan adanya

berita buruk (bad news) jika perusahaan tidak segera mempublikasi laporan

keuangan yang akan berpengaruh pada keputusan investasi yang akan datang

(Suparsada dan Putri 2017). Maka hipotesisnya sebagai berikut.

H₅: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *audit delay*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Variabel bebas dalam penelitian ini

diantaranya *financial distress*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite

audit dan kepemilikan institusional sedangkan variabel terikatnya adalah audit

delay. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan

kriteria sebagai berikut: Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan

laporan keuangan berturut-turut selama Tahun 2015-2017; Perusahaan

pertambangan yang menampilkan data yang diperlukan secara lengkap;

Perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah komite sesuai dengan peraturan

OJK Nomor 55/POJK.04/2015. Penelitian ini menggunakan definisi operasional

variabel sebagai berikut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber (tahun)	
Financial distress	$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$	Sakka dan Jarboui (2016)	
Ukuran Perusahaan	Ln Total Aktiva	Apadore dan Noor (2013)	
Dewan Komisaris Independen	Proporsi dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris	Bemby et al. (2013)	
Komite Audit	Jumlah Komite audit	Bemby et al. (2013)	
Kepemilikan institusional	Proporsi jumlah saham pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar	Bemby et al. (2013)	
Audit Delay	Jumlah hari tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) hingga tanggal yang tertera pada laporan auditor independen	Sakka dan Jarboui (2016)	

Sumber: Data diolah, 2018

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan *go public* yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 yang dapat diakses melalui www.idx.co.id, www.sahamok.com serta melihat di situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik analisa menggunakan regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon . \dots (1)$$

Keterangan:		
Y	=	Audit Delay
α	=	Konstanta
$\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4,\beta_5$	=	Koefisien regresi
X_1	=	Financial Distress
X_2	=	Ukuran Perusahaan
X_3	=	Komisaris Independen
X_4	=	Komite Audit
X_5	=	Kepemilikan Institusional
3	=	Nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, maka diperoleh jumlah perusahaan pertambangan yang terpilih sebagai sampel penelitian ini sebanyak 32 perusahaan. Proses seleksi sampel dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017	41
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2015-2017.	(2)
3.	Perusahaan pertambangan yang tidak menampilkan data yang diperlukan secara lengkap.	(3)
4.	Perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015	(4)
	Jumlah sampel akhir	32
	Tahun pengamatan	3
	Jumlah pengamatan	96

Sumber: Data diolah, 2018

Perusahaan yang mengalami *delisting* diantaranya Permata Prima Sakti Tbk. dan Brau Coral Energy Tbk. Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2015-2017 diantaranya perusahaan Alfa Energi Investama Tbk. dan Kapuas Prima Coal Tbk. Perusahaan pertambangan yang tidak menampilkan data yang diperlukan secara lengkap diantaranya perusahaan J Resources Asia Pacific Tbk., Garda Tujuh Buana Tbk., dan Ratu Prabu Energi Tbk. Perusahaan pertambangan yang memiliki jumlah komite audit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni memiliki komite audit dibawah 3 diantaranya Atlas Resources Tbk., Borneo lumbung Energy & Metal Tbk., Mitra Investindo Tbk., dan Benakat Integra Tbk.

Hasil statistik deskriptif dari variabel *financial distress*, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017disajikan dalam Tabel 3. sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Audit delay	96	22,00	274,00	80,281	34,068
Financial distress	96	0,02	1,90	0,492	0,303
Ukuran Perusahaan	96	24,12	32,16	29,005	1,659
Komisaris independen	96	0,30	0,75	0,4056	0,093
Komite audit	96	3,00	5,00	3,1458	0,383
Kepemilikan institusional	96	0,15	0,97	0,6792	0,233

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan statistik deskriptif, diperoleh nilai *audit delay* sebesar 22 hari hingga 274 hari sedangkan nilai rata-rata sebesar 80,28 hari dan standar deviasi sebesar 34,07. *Audit delay* tercepat dialami pada tahun 2015 oleh Central Omega Resources Tbk. dan *audit delay* terlama dialami oleh Bumi Resources Tbk. pada tahun 2015. Hal ini menunjukan bahwa di Bursa Efek Indonesia masih terdapat perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan auditan melewati batas yang ditetapkan oleh OJK.

Variabel *financial distress* yang diproksikan dengan *debt to total asset* (DAR) memiliki nilai minimum 0,02 yaitu perusahaan Cakra Mineral Tbk. pada tahun pengamatan 2016, nilai maksimum 1,90 yaitu perusahaan Bumi Resources Tbk. pada tahun pengamatan 2016, rata- rata sebesar 0,49 dan standar deviasi

sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai *financial distress*

yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,30.

Variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset yang

dilogaritmanaturalkan memiliki nilai minimum sebesar 24,12, yaitu perusahaan

Aneka Tambang (Persero) Tbk. pada tahun pengamatan 2016 dan 2017, nilai

maksimum sebesar 32,16, yaitu perusahaan Adaro Energy Tbk. pada tahun

pengamatan 2017, rata-rata sebesar 29, dan standar deviasi sebsar 1,66. Hal ini

menunjukan bahwa terjadi perbedaan nilai ukuran perusahaan yang diteliti

terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,66.

Variabel dewan komisaris independen yang diproksikan dengan proporsi

dewan komisaris indepeden dengan total dewan komisaris indepeden memiliki

nilai minimum sebesar 0,30, yaitu perusahaan Vale Indonesia Tbk., nilai

maksimum sebesar 0,75 yaitu perusahaan Golden Eagle Energy Tbk., rata-rata

sebesar 0,41 dan standar deviasi sebesar 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi

perbedaan nilai dewan komisaris independen yang diteliti terhadap nilai rata-

ratanya sebesar 0,09.

Variabel komite audit yang diproksikan dengan jumlah komite audit

memiliki nilai minimum sebesar 3 yang dimiliki sebagian besar perusahaan

pertambangan yang dijadikan sampel, nilai maksimum sebesar 5, yaitu perusahaan

Timah (persero) Tbk. pada tahun pengamatan 2015, rata-rata sebesar 3,15 dan

standar deviasi sebesar 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai

komite audit yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,38.

Variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan proporsi saham yang dimiliki investor institusional dengan jumlah saham yang beredar memiliki nilai minimum sebesar 0,15, yaitu perusahaan Energy Mega Persada Tbk., nilai maksimum sebesar 0,97 yaitu perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk., rata rata sebesar 0,68 dan standar deviasi sebesar 0,23. Hal ini menunjukan bahwa terjadi perbedaan nilai kepemilikan institusional yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,23.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Pengujian normalitas didapatkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,163 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $\rho = 0,163 > 0,05$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Pengujian autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-test). Hasil uji menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,935. Nilai D-W menurut table dengan n = 96 dan k =5 didapat nilai dl = 1,560 dan nilai du = 1,778. Oleh karena nilai du<d<(4-du) (1,778<1,935<2,222) maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual.

Pengujian multikolonearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF. Hasil uji diketahui dari hasil tersebut variabel *financial distress*, ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh

karena itu disimpulkan pada model analisis tersebut tidak ditemukan adanya gejala multikoloniearitas.

Pengujian heterokedastisitas dalam model regresi yang baik yakni tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu sebesar 5% (0,05). Hasil pengujian menunjukan hasil nilai signifikansi *financial distress* sebesar 0,148, ukuran perusahaan sebesar 0,843, komisaris independen sebesar 0,055, komite audit sebesar 0,078, dan kepemilikan institusional sebesar 0,419 . Hasil tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Unstanda Coeffic		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. B Error		— Т	Sig.
1	(Contant)	158,175	60,302	Beta	2,623	0,010
	Financial distress	49,875	12,356	0,444	4,036	0,000
	Ukuran Perusahaan	-2,348	0,929	-0,114	-2,529	0,020
	Komisaris independen	54,619	26,408	0,149	2,068	0,045
	Komite audit	-13,469	5,717	-0,152	-2,356	0,034
	Kepemilikan institusional	-20,373	9,521	-0,139	-2,140	0,043
	F hitung	: 8,984				
	Sig. F	: 0,000				
	R Square	: 0,593				
	Adjusted R ²	: 0,590				

Sumber: Data diolah, 2018

 $Y = 158,175 + 49,875 \; X_1 - 2,348 \; X_2 + 54,619 \; X_3 - 13,469 \; X_4 - 20,373 \; X_5 + \epsilon$

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,984 dengan nilai signifikansi P *value* 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, ini berarti model yang

digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa kelima variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena *audit delay* pada sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

Tabel 4 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,590 memiliki arti bahwa variasi *audit delay* dapat dipengaruhi oleh variabel financial distress, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional sebesar 59%, sedangkan sisanya sebesar 41% dijelaskan oleh faktorfaktor lain yang tidak termasuk dalam model.

Tabel 4. menunjukan nilai koefisien regresi *financial distress* adalah sebesar 49,875 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha=0,05$. Hasil menunjukan bahwa *financial distress* secara statistik berpengaruh positif terhadap *audit delay* dengan demikian H_1 dapat diterima. Teori *signaling* menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dimana sinyal yang ditangkap berupa *bad news* atau *good news* (Akerlof, 1970). *Financial distress* merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya agar terlihat lebih baik dan dengan adanya perbaikan laporan keuangan tersebut maka penyampaian laporan keuangan yang diaudit akan lebih panjang (Kusuma, 2018). Selain itu, tingginya proporsi hutang terhadap total aset akan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan dan dapat meningkatkan kekhawatiran tambahan auditor bahwa laporan keuangan mungkin kurang dapat diandalkan dari biasanya, seperti

kemungkinan penipuan manajemen dan karenanya auditor harus lebih teliti

memeriksa laporan keuangannya sehingga dapat menambah audit delay (Carslaw

dan Kaplan, 1991).

Hasil penelitian ini menunjukkan secara statistik semakin tinggi nilai rasio

financial distress maka audit delay semakin panjang. Kondisi financial distress

yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor

independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi dengan

meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko

sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit (audit

planning) sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan

berdampak pada bertambahnya audit delay (Praptika dan Rasmini, 2016). Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Praptika dan Rasmini (2016) dan Kusuma

(2018) financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay serta penelitian

Vuko dan Cular (2014), Sakka dan Jarboui (2016) yang menunjukan debt to total

asset positif terhadap audit delay.

Tabel 4. menunjukkan nilai koefisien regresi ukuran perusahaan adalah

sebesar -2,348 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dibandingkan

dengan taraf nyata $\alpha = 0.05$. Hasil menunjukan bahwa ukuran perusahaan secara

statistik berpengaruh negatif terhadap audit delay dengan demikian H2 dapat

diterima. Hasil ini mendukung teori agensi, perusahaan besar berusaha untuk

mengkompensasi kehilangan kontrol dan mengurangi biaya pemantauan dengan

mengadopsi sistem audit dan kontrol internal yang kuat sehingga memungkinkan

auditor eksternal untuk bergantung pada sistem tersebut secara lebih luas dan

dengan demikian mengurangi pekerjaan audit yang diperlukan. Perusahaan besar cenderung memiliki sistem pengendalian internal yang baik (Hassan, 2016).

Perusahaan besar lebih mungkin untuk memberikan tekanan yang lebih besar pada auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan lebih cepat. Perusahaan besar cenderung akan mempublikasikan lebih awal laporan keuangannya daripada perusahaan kecil karena perusahaan tersebut diawasi secara ketat oleh investor, kreditur, pengawas dan pemerintah sehingga perusahaan berskala besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit yang lebih awal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suparsada dan Putri (2017), Sari (2015), Apadore and Noor (2013), Hassan (2016), Sakka dan Jarboui (2016) yang menunjukkan pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan audit delay

Tabel 4. menunjukkan nilai koefisien regresi dewan komisaris independen adalah sebesar 54,619 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha = 0.05$. Hasil menunjukan bahwa dewan komisaris independen secara statistik berpengaruh positif terhadap audit delay dengan demikian H₃ dapat diterima. Hal ini karena semakin besar proporsi dewan komisaris independen cenderung menjadi dorongan untuk masalah seperti argumen atau permusuhan karena perbedaan pendapat dan saran, hal ini akan memperpanjang ketepatan waktu laporan audit. Selain itu, dapat juga dikarenakan pada proporsi komisaris independen yang besar terdapat banyaknya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan menyebabkan penundaan atas pelaporan keuangan. Proporsi komisaris independen yang besar juga

memungkinkan timbulnya intervensi yang berlebihan kepada perusahaan. Hal ini

disebabkan oleh komposisi dewan komisaris yang mayoritas terisi oleh komisaris

independen. Hasil penelitian ini sejalah dengan penelitian Joened dan Damayanthi

(2016), Azubike and M. Aggreh (2014), dan Harindahyani (2018) menunjukan

pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap audit delay.

Tabel 4. menunjukkan nilai koefisien regresi komite audit adalah sebesar -

13,469 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dibandingkan dengan

taraf nyata $\alpha = 0.05$. Hasil ini menunjukan bahwa komite audit secara statistik

berpengaruh negatif terhadap audit delay dengan demikian H₄ dapat diterima.

Jumlah keanggotaan komite audit yang lebih besar akan mampu bekerja lebih

efektif untuk mengawasi jalannya pelaporan keuangan oleh manajemen

perusahaan (Choi et al., 2004). Penerapan komite audit yang baik kepada

perusahaan akan mampu menciptakan laporan keuangan yang andal yaitu

informasi yang disajikan secara wajar dan bebas dari pengertian yang

menyesatkan serta kesalahan material. Laporan keuangan perusahaan yang

terpercaya pada akhirnya akan memfasilitasi dan mempercepat audit yang

dilakukan oleh auditor independen. Hal ini karena peluang auditor independen

dalam menemukan salah saji material akan lebih kecil, sehingga audit laporan

keuangan akan lebih singkat (Putra et al., 2017).

Perusahaan dengan jumlah komite audit yang lebih banyak akan

memberikan beberapa tekanan atau tuntutan pada manajemen dan karenanya

laporan audit yang lebih cepat (Apadore and Noor, 2013). Hasil ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Bemby et al., (2013), Gunarsa dan Putri (2017),

Putra *et al.* (2017), Santiani (2018) komite audit dikatakan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Tabel 4. menunjukkan nilai koefisien regresi kepemilikan institusional adalah sebesar -20,373 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha = 0.05$. Hasil menunjukan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh negatif terhadap audit delay dengan demikian H₄ dapat diterima. Konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen dapat diminimalisir dengan kepemilikan institusional. Mengingat bobot yang cukup besar yang dimiliki investor institusi di dalam perusahaan, investor institusi bertanggung jawab untuk memainkan peran aktif dalam memantau dan mendisiplinkan wewenang manajer serta proses pelaporan keuangan (Sakka and Jarboui, 2016). Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen (Arumsari, 2017).

Penelitian Sakka *and* Jarboui (2016) menunjukkan peningkatan kepemilikan investor institusional dapat meminimalkan *delay audit* dan mengurangi kemungkinan kecurangan manajemen. Kepemilikan dari pihak institusi juga dapat mengurangi *audit delay* karena pihak institusi dapat menuntut pihak manajemen agar tepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan

auditan. Para pemilik investasi akan mengindikasikan adanya berita buruk jika

perusahaan tidak segera mempublikasi laporan keuangan yang akan berpengaruh

pada keputusan investasi yang akan datang (Suparsada dan Putri 2017). Hasil ini

sejalan dengan penelitian Sakka and Jarboui (2016), Suparsada (2017), Arumsari

(2017) yang menunjukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan

institusional dengan audit delay.

Implikasi penelitian ini terdiri dari teoritis dan praktis. Secara teori, teori

keagenan dan teori sinyal merupakan teori utama penelitian ini. Asimetri

informasi dapat memicu konflik keagenan sehingga diperlukan adanya pihak

ketiga yakni auditor yang bertugas memastikan kewajaran informasi yang

disampaikan manajemen. Konflik keagenan mendasari biaya keagenan. Biaya

audit eksternal merupakan salah satu komponen biaya agensi diantaranya

monitoring cost.

Terkait ukuran perusahaan, perusahaan besar berusaha untuk

mengkompensasi kehilangan kontrol dan mengurangi monitoring cost dengan

mengadopsi sistem audit dan kontrol internal yang kuat sehingga memungkinkan

auditor eksternal untuk bergantung pada sistem tersebut secara lebih luas dan

dengan demikian mengurangi pekerjaan audit yang diperlukan. Selain itu, konflik

keagenan yang terjadi antara pemegang saham dapat diminimalisir dengan komite

audit dan kepemilikan institusional. Namun, tidak semua proksi corporate

governance mengurangi audit delay. Teori keagenan juga menyatakan bahwa ada

batas atas untuk jumlah kemandirian dewan, sejumlah besar independensi dewan

dapat menciptakan masalah komunikasi dan koordinasi sehingga efektivitas dan

pemantauan efisiensi menurun. Teori sinyal memfokuskan pada proses pengauditan bila perusahaan mengalami rugi atau mengindikasikan adanya kondisi keuangan yang buruk maka hal itu merupakan sinyal tersendiri kepada auditor mengenai resiko audit yang tinggi sehingga mempengaruhi jangka waktu audit.

Stakeholders Theory dan teori kepatuhan merupakan teori pendukung. Stakeholders Theory menyatakan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan dipertanggungjawabkan tidak hanya untuk pemegang saham tapi juga stakeholder lain diantaranya karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, institusi dan masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada stakeholders tersebut dapat berupa pelaporan keuangan yang dalam prakteknya memerlukan pihak ketiga (auditor independen) guna menjamin kewajaran laporan keuangan. Teori Kepatuhan melandasi penelitian ini dimana audit delay sangat berkaitan dengan peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 yang mewajibkan setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Oleh karena itu, dalam proses pengauditannya auditor harus memikirkan jangka waktu audit yang dilakukan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak khususnya perusahaan dan auditor. Bagi pihak perusahaan agar dapat melakukan kontrol terhadap kondisi keuangan perusahaan untuk mengurangi tingkat kesulitan keuangan dimasa depan serta mengurangi

tindakan yang dapat merusak citra perusahaan. Bagi pihak auditor diharapkan

memperhatikan ketepatwaktuan pelaporan audit walaupun perusahaan tersebut

dalam kondisi kesulitan keuangan yang tinggi dan memberikan sinyal bahwa

resiko audit tinggi.

SIMPULAN

Financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay. Ukuran perusahaan

berpengaruh negative terhadap audit delay. Dewan komisaris independen

berpengaruh positif terhadap audit delay. Komite audit berpengaruh negative

terhadap audit delay. Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap

audit delay. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain diluar

variabel yang telah digunakan. Menambah tahun penelitian serta dapat memilih

lokasi penelitian di sektor lain guna melihat pengaruh variabel lainnya terhadap

audit delay. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan pengukuran DAR

(debt to total asset) pada variabel financial distress yaitu utang pada pihak ketiga

maupun pihak berelasi dikarenakan bunga atas pinjamannya yang mungkin lebih

lunak sehingga kurang mampu mencerminkan kondisi financial distress

perusahaan.

Perusahaan disarankan agar dapat mempersiapkan laporan keuangan

dengan lengkap dan memperhatikan ketepatwaktuan sesuai aturan yang berlaku

sehingga proses audit berjalan dengan lancar. Bagi pihak auditor diharapkan

memperhatikan ketepatwaktuan pelaporan audit walaupun perusahaan tersebut

dalam kondisi kesulitan keuangan yang tinggi.

REFERENSI

- Afify, H. A. E. (2009) 'Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt', *Journal of Applied Accounting Research*, 10(1), pp. 56–86. doi: 10.1108/09675420910963397.
- Akerlof, G. A. (1970) 'The Market for Lemons Quality Uncertainty and the Market Mechanism', *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), pp. 488–500. doi: 10.2307/1879431.
- Akhalumeh, P. B., Izevbekhai, M. O. and Ohenhen, E. (2017) 'Firm Characteristics and Audit Report Delay in Nigeria: Evidence from The Post-IFRS Adoption Era', *Journal International Accounting and Taxation Reserch Group University of Benin*, 1, pp. 83–105.
- Apadore, K. and Noor, M. M. (2013) 'Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in', *International Journal of Business and Management*, 8(15), pp. 151–163. doi: 10.5539/ijbm.v8n15p151.
- Arifuddin, Hanafi, K. and Usman, asri (2017) 'Company Size. Profitability, and Auditor opinion Influence to audit Report Lag on Registered Manufanturing Company in Indonesia Stock Exchange', *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 5(19), pp. 353–367.
- Arumsari, V. F. (2017) 'Pengaruh Kepemilikan Saham, Leverage, Profitabilitas, dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(4).pp. 1364-1379.
- Ashton, R. H., Graul, P. R. and Newton, J. D. (1989) 'Audit delay and the timeliness of corporate reporting', *Contemporary Accounting Research*, 5(2), pp. 657–673. doi: 10.1111/j.1911-3846.1989.tb00732.x.
- Azubike, J. U. B. and Aggreh, M. (2014) 'Corporate Governance and Audit Delay in Nigerian Quoted Companies', *European journal of accounting and finance research*, 2(10), pp. 22–33.
- Bemby, B. *et al.* (2013) 'Good Corporate Governance (GCG) Mechanism and Audit Delay: An Empirical Study on Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the Period of 2009-2011', *Journal of Modern accounting and Auditing*, 9(11), pp. 1454–1468.

- Bursa Efek Indonesia (2016) 'Pengumuman Penyampaian laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2015', www.idx.co.id. diakses tanggal 21 Agustus 2018
- Carslaw, C. A. P. N., and Kaplan, S. E. (1991) 'An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand', *Accounting and Business Research*, 85(December), pp. 21–32.
- Choi, J.-H., Jeon, K.-A. and Park, J.-I. (2004) 'The role of audit committees in decreasing earnings management: Korean evidence', *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 1(1), pp. 37–60. doi: 10.1504/IJAAPE.2004.004142.
- Dimitropoulos, P. E. and Asteriou, D. (2010) 'Research in International Business and Finance The effect of board composition on the informativeness and quality of annual earnings: Empirical evidence from Greece', *Research in International Business and Finance*. Elsevier B.V., 24(2), pp. 190–205. doi: 10.1016/j.ribaf.2009.12.001.
- Diratama, I. (2018) 'Analisis Prediksi Kebangkrutan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1).
- Gunarsa, I. G. A. C. dan Putri, I. A. D. (2017) 'Pengaruh Komite Audit, Independensi komite Audit, dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag di Perusahaan Manufaktur', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(2), pp. 1672–1703.
- Harindahyani, D. L. S. (2018) 'The Effect of Corporate Governanceon Audit Report Timeliness in Indonesia', *Journal accounting University of surabaya*, 16(2), pp. 209–223.
- Hassan, M. Y. (2016) 'Determinants of Audit Report Lag: Evidence From Palistine', *Journal of accounting in Emerging Economies*, 6(1), pp. 13–32.
- Indopremier.com (2018) Tunggak Laporan Keuangan, BEI Hentikan Sementara Perdagangan 10 Saham, https://www.indopremier.com. Jakarta. Available at: https://www.indopremier.com (Accessed: 21 July 2018).
- Ishaq, M. and Che-ahmad, A. (2016) 'Effects of Board Size, Board Committees Characteristics and Audit Quality on Audit Report Lags', *International Soft Science Conference*.
- Joened, J. aryadi dan Damayanthi, I. G. ayu E. (2016) 'Pengaruh Karakteristik dewan komisaris, Opini auditor, Profitabilitas, dan Reputasi auditor pada Timeliness of Financial Reporting', *E-Jurnal Akuntansi Universitas*

- *Udayana*, 14(1), pp. 423–450.
- Kusuma, B. C. (2018) 'Ukuran Perusahaan sebagai Variabel moderasi Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, dan Kepemilikan Publik Terhadap Audit Report Lag', *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Lawrence, I., Ph, A. and Elijah, A. (2015) 'Corporate Attributes and Audit Delay in Emerging Markets: Empirical Evidence from Nigeria', *International Journal of Business and Social Research*, 5(3), pp. 1–10.
- Liputan6.com (2017) 'Belum Sampaikan Laporan Keuangan, BEI Suspensi 17 Saham Emiten', www.liputan6.com. diakses tanggal 21 Agustus 2018.
- Mohamad-Nor, M. N., Shafie, R. and Wan-Hussin, W. N. (2010) 'Corporate Governance and Audit Report Lag', *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 6(2), pp. 57–84. doi: 10.1080/00014788.2015.1039475.
- OJK (2014) Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Ojk.Go.Id. Jakarta. Available at: http://www.ojk.go.id/id. diakses tanggal 21 Agustus 2018
- OJK (2015) *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Ojk.Go.Id.* Jakarta. Available at: http://www.ojk.go.id. diakses tanggal 21 Agustus 2018
- OJK (2016) *Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta. Available at: www.ojk.go.id. diakses tanggal 21 Agustus 2018.
- Panggabean, A. P. and Yendrawati, R. (2016) 'The Effect of Corporate Governance, Tenure Audit, and Quality of Earnings Towards audit Delay with Auditor's Specialization as The Variable of Moderation', *Asian Journal of Inovation and Entrepreneurship*, 1(1).pp. 2477-3824
- Praptika, P. Y. H. and Rasmini, N. K. (2016) 'Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), pp. 2052–2081.
- Pratama, H. G. (2014) 'Pengaruh Ukuran Kap, Profitabilitas, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2009-2013', *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.pp 1-26
- Putra, R., Sutrisno, T. and Mardiati, E. (2017) 'Determinant of Audit Delay: Evidance from Public Companies in Indonesia', *International Journal of*

- Business and Management Invention, 6(6), pp. 12–21.
- Sakka, I. F. and Jarboui, A. (2016) 'Audit reports timeliness: Empirical evidence from', *Cogent Business & Management*. Cogent, 16, pp. 1–13.
- Santiani, K. N. (2018) 'Pengaruh Independensi, Keanggotaan, Kompetensi, dan Gender Komite Audit Terhadap Audit Delay', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), pp. 436–460.
- Sari, C. S. P. (2015) 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas KAP, dan Probabilitas Kebangkrutan pada Audit Delay', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 26(2), pp. 101–108.
- Senjaya, K. and H, S. B. (2016) 'Tingkat Spesialisasi Industri Auditor sebagai Pemoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan Pada Audit Delay', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), pp. 2013–2040.
- Suparsada, N. P. Y. D. dan Putri, I. A. D. (2017) 'Pengaruh Profitabilitas, Reputasi auditor, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional, Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), pp. 60–87.
- Swami, D. N. P. dan Latrini, M. Y. (2013) 'Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Audit Report Lag', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 3, pp. 530–549.
- Tarjo (2008) 'Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham Serta Cost of Equity Capital', *Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi*, 11.
- Vuko, T. and Cular, M. (2014) 'Finding determinants of audit delay by pooled OLS regression analysis', *International Journal of University of Split*, 5, pp. 81–91.
- Widyastuti, M. T. dan Astika, I. B. P. (2017) 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi Perusahaan dan Jenis Industri Terhadap Audit Delay', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), pp. 1082–1111.